BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang - undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli ialah sebagai berikut :

- a. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaar feit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²

- c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³
- e. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

² www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1 diakses pada tanggal 15 januari 2019 pukul 14.25

³ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-7, hlm. 72

⁴ Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) unsur-unsur perbuatan pidana.⁵

a. Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 64

b. Unsur material

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patuh dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana di bedakan dua macam yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana unsur ini meliputi:

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-

undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁶

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:⁷

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸

- 1) Subyek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

⁶ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 79.

⁷ *Ibid*, hlm. 81

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).⁹

⁹ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014.

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁰

Dalam kamus hukum istilah “sanksi” disebut dengan istilah “*sanctie*” yang berarti ancaman hukuman merupakan suatu alat pemaksaan guna ditaatinya suatu kaidah undang-undang.¹¹ Kemudian dalam terminologi hukum pidana, yang dimaksud dengan sanksi (*sanctie*) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Kemudian yang dimaksud dengan sanksi pidana (*strafsanctie*) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹²

Para pakar hukum pidana, ada yang menyebut sanksi dalam hukum pidana dengan istilah “pidana” Menurut Saleh, pidana

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8.

¹¹ Simorangkir, J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 152.

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 138.

adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik. Kemudian Sudarto mengatakan, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

Disamping istilah pidana, ada juga pakar hukum yang menyebutnya dengan istilah “hukuman”.¹⁴ Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan *ponis* kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁵ Juga mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang.

Dengan demikian, sanksi dalam hukum pidana disebut dengan istilah “pidana atau hukuman”, yang diartikan sebagai suatu penderitaan atau sengsara atau nestapa yang diberikan oleh negara melalui alat-alatnya kepada pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, sanksi dalam hukum pidana tidak hanya dalam

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlmn. 186.

¹⁴ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 35.

¹⁵ Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), hlm. 289.

bentuk “pidana”, tetapi juga dalam bentuk tindakan yang disebut dengan “tindakan”, Menurut Ali, dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar landasan filosofis yang melatarbelakangi, dan tujuannya.¹⁶

Sanksi tindakan (*matreegel*) merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perorangan, badan hukum publik maupun perdata.¹⁸

2. Pembagian Sanksi Pidana

¹⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 193.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 194.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 203-204

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang yang menyimpang, jenis-jenis itu dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁹

- a. Pidana Pokok
 - Pidana mati
Pidana ini merupakan pidana terberat menurut hukum positif. Hal ini masih nmenjadi masalah dalam ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakannn dalam masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam KUHP.
 - Pidana Penjara
Pidana penjara adalah pidana percabutan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi mulai dari penjara seumur hidup minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana pejara seumur hidup hanya tercantum di mana ancaman pidana mati. Pada umumnya pidana pidana penjara adalah 15 tahun.
 - Pidana kurungan
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.
 - Pidana denda.
Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.
 - Pidana tutupan

¹⁹ Lihat Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Pidana tutupan lebih berat daripada pidana denda. Akan lebih tepat percantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP di letakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan

- b. Pidana tambahan
 - Pidana cabutan hak-hak tertentu
 - Pidana perampasan
 - Pidana pengumuman putusan hakim²⁰
- c. Tindakan
 - Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana), contoh perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada seseorang, penyerahan kepada pemerintah.
 - Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggungjawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana), rehabilitas, perbaikan akibat-akibat tindak pidana, perawatan disuatu lembaga.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, selanjutnya, di sebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Prancis: *corruption*, dan Belanda: *corruption* (*korruptir*). Dapat kita benarkan bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi”.²¹

²⁰Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996 hlm. 22.

²¹ Andi Hamzah, *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, jakarta,rajawali,press, 2007 hlm. 7.

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²² Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.²³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana Korupsi adalah :²⁴

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

²² W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

²³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 15.

²⁴ Lihat Bab II Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Macam - Macam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Adami Chazawi, bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:²⁵

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan dalam Pasal 3.
3. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5.
4. Tindak pidana korupsi penyuapan pada Hakim dan Advokat dalam Pasal 6.
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI dalam Pasal 7.
6. Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga dalam Pasal 9.
7. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar dalam Pasal 9.
8. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar dalam Pasal 10.
9. Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan keenangan jabatan dalam Pasal 11.
10. Korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri meminta pekerjaan; menggunakan tanah

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.25.

Negara; danturut serta dalam pemborongan dalam Pasal 12.

11. Tindak pidana pegawai negeri menerima gratifikasi dalam Pasal 12B jo 12C.
12. Korupsi penyuapan pegawai negeri mengingat kekuasaan jabatan dalam Pasal 13.
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP dalam perkara korupsi dalam Pasal 23.

Dari Rumusan bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, pada setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.

D. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Dalam sejarah hukum acara pidana dikenal adanya empat macam sistem pembuktian. Keempat macam sistem pembuktian tersebut adalah:²⁶

1. Sistem keyakinan belaka;
2. Sistem keyakinan berdasarkan alasan yang rasional;
3. Sistem menurut undang-undang belaka; dan,
4. Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas.

E. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti

²⁶ Gerald Majampoh, *Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan Dan Proses Penanganannya*. Artikel pada jurnal *Lex Crimen*, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013 hal 121.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan hukum”, hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dari segi urutan alat bukti, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam hukum acara pidana.

²⁷Alfitra.*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi di Indonesia.* (Jakarta: Raih Asa Sukses,2011) Hlm.23

Pengertian keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP merumuskan bahwa

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.”

Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah terlampaui dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau menguapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan saksi beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Sedangkan menurut R.Soesilo,²⁸ saksi merupakan suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Adapun macam-macam saksi adalah sebagai berikut:

²⁸ R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982. Hlm.113

1. Yang memberatkan (saksi A Charge)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.²⁹ Saksi yang memberatkan inibiasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal inidilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban. Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapatsaja saksi berperan penting bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

2. Yang meringankan(A de Charge)

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sumur, 1977., hm.120.

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni:³⁰

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Selain itu, dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

3. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki

³⁰ Anandito Utama.
*klirik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/
mahkota--dan-alibi/*

<https://www.hukumonline.com/saksi-memberatkan--meringankan-->

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan di persidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

4. Saksi Korban

Saksi korban merupakan saksi yang menjadi korban tindak pidana. Seorang saksi korban, pada umumnya cenderung memiliki kelebihan dibandingkan dengan saksi-saksi lainnya. Ini karena saksi korban tersebut memiliki kemungkinan lebih besar memang mendengar sendiri, melihat sendiri dan atau mengalami sendiri suatu

peristiwa pidana. Hal ini sebab saksi korban yang secara langsung terkena suatu peristiwa pidana.³¹

Pasal 108 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan jelas dapat diketahui bahwa sebagai ketentuan umum, melaporkan suatu tindak pidana, yang dengan sendirinya akan berlanjut dengan memberikan keterangan sebagai saksi, merupakan suatu hak.

5. Saksi Mahkota

Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam

³¹ Mekri Norton Kumajas. *Kedudukan Saksi Korban Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Lex et Societatis, Vol. III/No. 5/Juni/2015. Hal. 99.

bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Mulyadi, saksi mahkota berasal dari bahasa Belanda “kroon getuige” yang artinya saksi negara yang utama.³²

Mahkamah Agung pun memberikan definisi mengenai saksi mahkota, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011, yaitu:

“Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang “tersangka atau terdakwa” lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, “dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. “Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya” suatu tuntutan yang sangat ringan “apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.

6. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RINo 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama.

³² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm180.

Definisi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.³³

F. *Obstruction Of Justice*

1. Pengertian *Obstruction Of Justice*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”.³⁴ Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*Obstruction of justice is frustration of governmental purposes by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit*”. Dengan pengertian demikian maka, *Obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan

³³ SEMA RI No 4 tahun 2011

³⁴ Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm 29

suatu proses hukum (pidana) saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.

Namun, Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan obstruction of justice tersebut sebagai berikut :”*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror.* Dalam kamus tersebut, memebrikan makna tentang tindakan menghalang- halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).³⁵

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum,karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas

³⁵ *Ibid* hal. 30.

menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.”³⁶

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.³⁷

2. Bentuk *Obstruction Of Justice*

Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

³⁶ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm136.

³⁷ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 285.

Obstruction Of Justice dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu :³⁸

- a. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- b. Perbuatan dengan sengaja merintang, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- c. Perbuatan dengan sengaja menggagalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

³⁸ Shinta Agustina dkk, Op.cit., hal. 134.

Adapun bentuk pelaksanaan perbuatan mencegah, menghalangi dan menggagalkan proses hukun dalam kasus tindak pidana korupsi itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yakni:

- a. Secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara langsung atau dalam bentuk turut serta bersama-sama dengan pelaku lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP; :
- b. Secara tidak langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan melalui perantara orang lain yang mempunyai pengaruh, pelaku tindak pidana melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum dan anggota majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut.³⁹

G. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam dan syariah, di mana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek

³⁹ *Ibid.* Hal 135.

pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariat di sebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.⁴⁰ Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan umur Sulaiman dengan mengutip defenisi al-Syafi'i dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seseorang mujtahid terhadap dalil-dali yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist.

Adapun istilah *jinayah*, secara etimologis berasal dari kata yang berarti (berbuat dosa), dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan

⁴⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016, hlm. 1.

kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik di berikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.⁴¹ Istilah lain *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa harta, atau lainnya.⁴²

Dari berbagai literatur yang ada, hampir semua secara umum bahwa tujuan *fiqh jinayah* atau hukum pidana islam adalah untuk menciptakan keadilan, ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴³

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim

⁴¹ Paisol Burlian, *Hukum Islam*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2017. hlm. 215.

⁴² Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Bairut* tanpa tahun, hlm 67.

⁴³ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung pustaka, 2007, hlm 53-54.

dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara*”, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *Syara*” yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta”zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan *Ijtihad*.⁴⁴

2. Pembagian dan Macam-Macam *Jarimah*

Pembagian *jarimah* dapat dibedakan penggolongannya menurut perbedaan cara meninjaunya:

- a. Dilihat dari berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *ta”zir*.
- b. Dilihat dari segi niat si pembuat, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *jarimah* disengaja dan *jarimah* tidak sengaja.

⁴⁴ Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2008, hlm. 15.

- c. Dilihat dari cara mengerjakannya, yang dibagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
- d. Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan yang dibagi pula menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
- e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, yang dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Penggolongan tersebut didasarkan atas berat-ringannya hukuman yang meliputi beberapa penjelasan sebagai berikut.⁴⁵

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancumannya ditentukan oleh nash yaitu hukum had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁵ Muslich Wardi *Hukum Pidana Menurut Al-Qura'an*. (Jakarta: Dindit Media, 2007). hlm 16.

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih ditonjolkan.

Ahmad Wardi Muslich menggolongkan pembagian jarimah hudud menjadi 7 (tujuh) macam golongan, yaitu: Zina, Murtad (*riddah*), Pemberontakan (*Al-baghy*), Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*), Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah*), Minum-minuman keras (*Shurb Al-khamar*). Dalam jarimah zina, minum khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazhaf (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu). Namun, hak Allah lebih ditonjolkan.

Demikianlah tindak pidana hudud yang semuanya pasti ada *nash* yang mengharamkan dan menentukan

⁴⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jil. IV*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, hlm, 149.

hukumannya. Hukum Islam bahkan menentukan hukuman-hukuman secara detail dalam tindak pidana hudud sehingga hukum Islam tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis, kadar, dan berat ringannya hukuman.⁴⁷

2) *Jarimah qishash* dan *diyat*

Jarimah qishash dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *diat* kedua-duanya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syar'a*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau

⁴⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jil. I, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008 hlm 138-150.

keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.⁴⁸

Adapun Mengenai Syarat-syarat wajib *qisas* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang membunuh sudah balig dan berakal
- b. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
- c. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu: agama, merdeka, anak dan bapak, orang kafir.
- d. Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam, atau dengan perjanjian.⁴⁹

Sedangkan hukuman *diyat* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korban sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku atas korbannya. Hukuman *diyat* adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan *qishash* dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa l-Fikih Al-Islamiy*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Tanpa tahun, hlm. 380.

⁴⁹ Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm, 431

atau orang yang dilukainya. Sedangkan kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *diyat* ialah:

- a. Pembunuhan disengaja.
- b. Pembunuhan seperti disengaja.
- c. Pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja).

Tindakan yang tergolong dalam jarimah qishash – diyat ini antara lain:⁵⁰

- a. Pembunuhan disengaja (*al-qatlul amdu*).
- b. Pembunuhan seperti disengaja (*al-qatlu syibhul amdi*).
- c. Pembunuhan karena kekhilafan (tidak disengaja, *al-qatlul khata*“).
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarhul ,, amdu*).
- e. penganiayaan tidak disengaja (*al-jarhul khata*“).

3) *Jarimah Ta”zir*.

Pengertian *ta”zir* menurut bahasa ialah *ta”dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Tetapi untuk Hukum Pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian

⁵⁰<https://docplayer.info/44542365-Bab-ii-jarimah-qishash-diyat-dalam-fiqih-jinayah.html> diakses pada senin 3 juni 2019 pukul 13.20.

tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap jarimah pada hukuman ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.⁵¹

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.⁵²

Mengenai macam-macam hukuman ini A. Djazuli membaginya sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm, 8.

⁵² Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 199 , 143

⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 65.

Pertama, di tinjau dari segi terdapat dan tidaknya terdapatnya *nash* dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya yaitu, *Qisas, diyat dan kafarah*
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi 3 kelompok.

- a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja dera seratus kali bagi pezini *ghairu muhsan*.
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* di jatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang di maafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qisas* yang di maafkan.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-takmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan atau jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan

tertentu atau mengalungkan tang yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam.⁵⁴

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantikan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ada pada hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.

Di kalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*.

3. Tujuan Pidana Dalam Islam

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di

⁵⁴ *Ibid* hal 66.

dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁵⁵ Tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu sebagai berikut :⁵⁶

- a. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*)
- b. Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.
- c. Pemidanaan di maksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.

4. Syarat-Syarat Hukuman (Sanksi)

Dalam menetapkan suatu sanksi kepada pelaku tindak kejahatan tentunya sanksi tersebut harus memiliki dasar hukum

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 125.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm , 288.

yang jelas. Berikut ini adalah syarat-syarat sahnya suatu hukuman dalam Islam, yaitu :⁵⁷

a. Hukuman harus ada dasarnya dari Syara'

Hukum dianggap mempunyai dasar (syari'iyah) apabila ia didasarkan pada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan di lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 141.

mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.⁵⁸

c. Hukuman harus berlaku umum

Hukuman harus bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin dan rakyat biasa atau penguasa. Apabila rakyat biasa dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman qishas maka penguasa yang melakukan pembunuhan juga harus dikenakan qishas. Namun demikian, prinsip persamaan hukuman secara sempurna hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan perlukaan.⁵⁹

5. Pelaksanaan Hukuman (Sanksi)

Yang berhak melakukannya adalah yang memiliki hak yaitu para wali korban, dengan syarat mampu melakukan qishâsh dengan baik sesuai syariat. Apabila tidak mampu, maka diserahkan

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm.141-142.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006, 1872.

kepada pemerintah atau wakilnya.⁶⁰ Sebagian ulama' berpendapat bahwa untuk hukuman qishas dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi disisi lain, menurut sebagian ulama' yang lain pelaksanaan qishas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melalui batas yang ditentukan.

⁶⁰ <https://almanhaj.or.id/3121-qishash.html> diakses pada jum'at 7 juni 2019 pukul 10.30.